

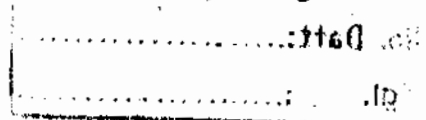
340.1  
TRI B-6  
h 9

## HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Disusun Oleh

Nanik Trihastuti, S.H.  
NIP. 131 763 893

Disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional, Agustus 1998



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

1998



*HM Kabul Supriyadi, S.H., M.Hum*  
*NIP. 131 927 443*

## BAB I

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup, maka tidak akan ada hukum (*ubi societas ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia.<sup>1)</sup>

Kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh hukum, juga oleh kaidah-kaidah susila dan moral manusia itu sendiri, yang mana keseluruhan kaidah dan nilai ini merupakan sistem konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia. Kaidah dan nilai-nilai moral merupakan produk kesadaran manusia.

Seperti diketahui, bahwa disamping ketertiban sebagai tujuan pertama dan paling pokok, hukum mempunyai tujuan lain yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya kepastian dalam hidup bermasyarakat yang hanya dapat diwujudkan dengan ditaatinya segala ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Pentaatan dari ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan cara teratur, dalam arti tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Dalam suatu negara, pemaksaan berlakunya

---

<sup>1)</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11

ketentuan-ketentuan ini berada di tangan negara beserta alat-alat perlengkapannya.<sup>2)</sup>

Oleh karena untuk pemanfaatannya hukum memerlukan paksaan, maka tentu saja hukumpun memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Namun demikian, kekuasaan inipun memerlukan pengaturan pula dari hukum agar tidak melampaui batas dan timbul kesewenang-wenangan.

Dalam kenyataannya, banyak terjadi ketidakadilan sebagai akibat disalahgunakannya kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok penguasa, yang mana perilaku buruk ini tidak lagi terjadi secara acak akan tetapi sudah melembaga secara struktural.

Pada umumnya, ketidakadilan terjadi jika:<sup>3)</sup>

- a. orang menindas hak orang lain,
- b. pejabat pemerintah mengistimewakan orang tertentu secara diskriminatif,
- c. ada orang yang tidak maupun memperoleh sarana yang paling mutlak diperlukan untuk menjadi dirinya.

Dari gambaran di atas tampak bahwa hukum tidak lagi berfungsi untuk memberikan batasan-batasan dan arah mengenai penggunaan kekuasaan, sebab kekuasaan seharusnya tunduk pada hukum, namun yang terjadi adalah sebaliknya, menciptakan banyak ketidakadilan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perspektif filsafat hukum.

<sup>2)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970, hlm. 4

<sup>3)</sup> B. Arief Sidharta, *Hukum Dan Moralitas*, PPs. Unpad, Bandung, 1999, hlm.

## BAB II

### HUBUNGAN ANTARA HUKUM, KEKUASAAN DAN KEADILAN

#### A. Hubungan Antara Hukum Dengan Kekuasaan

Masyarakat manapun, untuk dapat menjadi masyarakat manusia yang didalamnya tiap manusia individual dalam kebebasan sejati dapat mengalami kehidupan yang bermartabat manusiawi tanpa harus tergantung pada kekuatan membutuhkan keteriban berkeadilan. Untuk itu masyarakat memunculkan berbagai kaidah hukum yang kepatuhannya pada tingkat terakhir tidak sepenuhnya diserahkan pada kemauan bebas warga masyarakat perorangan, melainkan diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas publik yang kewenangan, dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.<sup>4)</sup>

Untuk mengetahui apakah hukum berfungsi di dalam masyarakat, maka yang harus diketahui adalah apakah hukum itu benar-benar berlaku dalam masyarakat.

Mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat, terdapat beberapa anggapan, yaitu:<sup>5)</sup>

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Keisen) atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan

---

<sup>4)</sup> B. Arief Sidharta. *Refleksi Terhadap Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia*, PPs. Unpad, Bandung, 1999, hlm. 4

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 13

- (W. Zavenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
  3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat memerlukan kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan hukum hanya bersifat anjuran. Akan tetapi sebaliknya kekuasaanpun memerlukan hukum untuk menentukan batas-batasnya. Hal ini sesuai dengan slogan yang sangat populer, bahwa "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".<sup>6)</sup>

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Dan sebagai suatu fenomena yang memiliki berbagai bentuk, kekuasaan memiliki beberapa sumber, yaitu di samping dimiliki oleh orang yang memiliki kewenangan resmi dan kekuatan baik fisik (senjata) maupun ekonomi, seringkali pula terjadi bahwa kejujuran moral yang tinggi dan pengetahuan dapat pula menjadi sumber timbulnya kekuasaan.

<sup>6)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 5

Pada dasarnya, kekuasaan memiliki sifat yang khas, yaitu bahwa ia cenderung untuk merangsang yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi.<sup>7)</sup>

Oleh sebab itu, maka kekuasaan dapat dimulai baik atau buruk tergantung dari bagaimana di pemegang kekuasaan menggunakannya. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur.<sup>8)</sup>

Pemegang kekuasaan memiliki peranan yang sangat penting, dimana untuk dapat terwujudnya keadilan yang dicita-citakan antara lain akan bergantung kepada bagaimana pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu disamping dibutuhkan hukum dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pembatas bagi pemegang kekuasaan, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh penguasa adalah kejujuran dan moral yang tinggi serta pengabdian yang tinggi bagi kepentingan masyarakat. Sebab sebaik apapun hukum diadakan untuk membatasi perilaku penguasa, namun jika mental dan moral penguasa tidak tangguh, maka pada akhirnya hukum justru akan diinjak-injak.

Untuk mengetahui keelatan hubungan antara hukum dan kekuasaan, dapat dilihat melalui dua cara, yaitu:<sup>9)</sup>

<sup>7)</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>8)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhadrata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hlm.19

<sup>9)</sup> Lili Rasjidi, Op.cit, hlm. 80-81

1) Dengan menelaah dari konsep sanksi.

Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi.

Karena sanksi merupakan suatu bentuk kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah.

2) Dengan menelaah dari konsep penegakan konstitusi.

Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri, yang biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum sendiri harus mendapatkan perlindungan dari suatu unsur kekuatan yang bukan hukum untuk kepentingan penegakannya yaitu kekuasaan.

Kekuatan yang diperlukan seperti tersebut di atas, dapat berwujud:<sup>10)</sup>

1. Keyakinan moral dari masyarakat.
2. Persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat.
3. Kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik.
4. Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka).
5. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.

<sup>10)</sup> Ibid, hlm. 82

## B. Hubungan Antara Kekuasaan Dan Keadilan

Manusia sebagai makhluk individual tumbuh dalam suatu masyarakat tertentu, yang didalamnya sudah ada sistem-sistem konseptual tentang moral dan hukum. Karena manusia tumbuh didalamnya, maka ia menyerap sistem-sistem itu menjadi bagian dari dirinya, menjadi miliknya. Namun setiap orang akan memilih posisinya sendiri berkenaan dengan sistem konseptual nilai dan kaidah yang ada. Ia akan mengambil sikap kritis terhadap moral yang berlaku dan memilih suatu pendirian dalam hidupnya yang sesuai dengan pribadi uniknya.<sup>11)</sup>

Berkaitan dengan muatan moral yang ada dalam hukum sendiri, menurut *Lou Fuller* harus dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal.<sup>12)</sup> Aspek eksternalnya menunjuk pada tuntunan moral terhadap hukum yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan adil.

Manusia merupakan makhluk yang berakal yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan dari hal tersebut kita dapat mengambil titik tolak martabat manusia.

Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki berbagai hak sebagai manusia individual, yang bertumpu pada 3 asas, yaitu.<sup>13)</sup>

<sup>11)</sup> J. J. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 224

<sup>12)</sup> B. Arief Sidharta, *Hukum Dan Moralitas*, PPs. Unpad, Bandung, 1999, hlm. 4

<sup>13)</sup> B. Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 3



1. Kemerdekaan dalam arti fundamental yaitu hak individu untuk merealisasikan kehidupannya sebagai sejarah dari dirinya sendiri, yang meliputi hak untuk berinteraksi dengan dunianya, hak untuk mengintegrasikan segala sesuatu (realitas) untuk pengembangan diri berdasarkan rencana yang dibuatnya sendiri.
2. Tiap individu harus mewujudkan kehidupan dirinya sendiri dengan secara aktif mengembangkan diri.
3. Untuk dapat merealisasikan diri, tiap individu harus dapat memiliki bagian tertentu dari dunia dan mengembangkan relasi-relasi tertentu dengan dunia

Berdasarkan hak-hak fundamental di atas, maka tuntunan moral mencakup:

- a. Hukum harus mempertahankan standar hidup manusiawi.
- b. Hukum harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan.
- c. Hukum harus melindungi yang lemah.
- d. Hukum harus menciptakan kondisi (*condition humaine*) yang perlu bagi kehidupan manusia yang adil.

Selanjutnya mengenai aspek internal moralitas hukum menunjuk pada aturan-aturan teknikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum sebagai wahana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum dapat diwujudkan.

Untuk dapat memberikan penilaian apakah pemegang kekuasaan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat, kita dapat bertitik tolak dari beberapa

asas keadilan bagi manusia sebagai makhluk individual yang memiliki moral dan martabat yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: <sup>14)</sup>

1. Tiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai mutlak. Menurut Imanuel Kant, manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri.
2. Individu seyogyanya mendukung atau mengabdikan masyarakat sebagai keseluruhan.
3. Kolektivitas seyogyanya membagi kekayaan masyarakat tanpa privilese bagi orang atau kelompok tertentu dengan mendiskriminasi yang lain.

Menurut Plato, keadilan adalah kebajikan dalam arti keselarasan dan keseimbangan batin yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumen rasional, sedangkan menurut Aristoteles kebajikan bersifat politis, dimana negara diatur dengan peraturan-peraturan yang adil dan peraturan-peraturan tersebut merupakan patokan dari apa yang benar. <sup>15)</sup> Menurut Aristoteles, terdapat beberapa macam keadilan, yaitu: <sup>16)</sup>

1. a. Keadilan Distributif, yang mengacu kepada pemberian jasa dan barang kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum;

<sup>14)</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>15)</sup> Aristoteles lebih menekankan pada keadilan legalitas atau keadilan positif daripada prinsip kebajikan yang kekal.

<sup>16)</sup> Friedman, W., Op.cit, hlm. 10-11

- b. Keadilan Korektif, yang merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui ukuran yang objektif.
- 2. a. Keadilan Menurut Hukum, yang mendapat kekuasaannya dari apa yang diterapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak;
- b. Keadilan Menurut Alam, yang mendapatkan kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
- 3. a. Keadilan Abstrak, dimana hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu;
- b. Kepatuhan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.

Meskipun begitu banyak teori mengenai keadilan, yang menjelaskan mengenai bagaimana pemegang kekuasaan harus bertindak laku dan menggunakan kekuasaannya dan bagaimana individu dan masyarakat dapat memperoleh perlakuan yang adil, namun dalam kenyataannya masih saja

terjadi dengan dalih "demi pembangunan", pemerintah melanggar hak-hak individu dengan menyingkirkan hukum atau dengan membuat ketentuan-ketentuan hukum yang merugikan rakyat biasa dan hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja. Sehingga sering terjadi bentrokan kepentingan, yang mana pihak penguasa beranggapan bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk menggunakan kekuasaan yang ada padanya demi kepentingan rakyat, sedangkan di pihak lain, tiap-tiap individu berusaha mempertahankan integritas, martabat dan kebebasannya.

Pada akhirnya, untuk dapat tegaknya *Rule of Law* yang dapat mewujudkan keadilan bagi setiap orang, maka terhadap beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu bahwa:<sup>17)</sup>

1. Setiap orang tanpa membedakan kedudukannya harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan biasa.
2. Hukum harus berdasarkan moral dan adalah keadilan bukannya kekuasaan yang harus menjadi dasar sejati dari suatu masyarakat, baik nasional maupun internasional.
3. Kekuasaan pemerintah jangan digunakan tanpa pembenaran (*justification*) yang dapat diterima untuk mengurangi atau menyingkirkan hak-hak individu, kecuali apabila tindakan-tindakan pemerintah itu terpaksa dilakukan demi kepentingan umum, sedangkan intervensi pemerintah sedemikian harus

<sup>17)</sup> R. Ramani, dikutip dari S. Tasrif, Tanggapan Atas Prasaran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., hlm 21

didasarkan kepada kaidah-kaidah dan norma-norma objektif yang didalam setiap keadaan dapat diselidiki dan diuji ada atau tidaknya keharusan oleh kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala pengaruh.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

- I. Antara Hukum dan Kekuasaan memiliki hubungan yang erat, yang mana untuk berlakunya hukum diperlukan pemaksaan dari kekuasaan, sebaliknya kekuasaan membutuhkan hukum untuk memberikan batasan-batasan dalam penggunaannya.
2. Keadilan hanya dapat dicapai apabila individu maupun pemerintah (pemegang kekuasaan) tunduk pada hukum serta memiliki moral yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Refleksi Terhadap Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia*, PPs Unpad, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dan Moralitas*, PPs Unpad, Bandung, 1999.
- J. J. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Friedman, W., *Teori Filsafat Hukum*, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Susunan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 19..
- S. Tasrif, *Tanggapan Atas Prasaran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., yang berjudul "Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional"*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977.
- \_\_\_\_\_, & Mustafa Adbullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.